

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Resources Dependence Theory

Teori ketergantungan sumber daya atau *resources dependence theory* (RDT) menyatakan bahwa sumber daya yang vital dapat mengurangi ketidakpastian dalam hubungan organisasi dan dapat meningkatkan *power* perusahaan (Preffer dan Salancik, 1978). Penekanannya adalah pada kemampuan perusahaan dalam membentuk tautan untuk mengamankan akses ke sumber daya penting seperti modal, pelanggan, pemasok, atau mitra kerja sama (Diepen, 2015). Dalam mengendalikan sumber daya dapat melalui penguasaan, kepemilikan atas sumber daya, kendali atas akses sumber daya, kendali atas pemakaian sumber daya, dan kemampuan meregulasi sumber daya (Preffer dan Salancik, 1978). *Resources Dependence Theory* berpendapat bahwa sumber daya yang dapat digunakan dalam menjalankan organisasi baik secara efektif dan efisien yaitu meliputi aset, manusia, kemampuan, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, dan pengetahuan yang dikendalikan perusahaan (Gudono, 2014).

Teori ketergantungan sumber daya mengeksplorasi bagaimana dewan memfasilitasi akses ke sumber daya yang berharga. Keragaman memiliki potensi untuk meningkatkan informasi yang diberikan oleh dewan kepada manajer karena informasi unik yang dimiliki oleh beragam direktur. Diversitas sumberdaya (direksi) yang berkaitan dengan ras, suku, kebangsaan dianggap penting dapat memaksimalkan sumberdaya perusahaan (Siciliano,

1996). Menurut RDT, perempuan memiliki sumber daya manusia yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya dan koneksi eksternal terhadap lingkungan yang berbeda, sehingga Carter dkk (2010) memperkirakan bahwa perempuan sebagai anggota dewan tidak akan memiliki efek yang sama seperti laki-laki sebagai anggota dewan. Teori ketergantungan sumber daya (RDT) menjelaskan peran dewan dalam mencapai tujuan CSR. Untuk tujuan ini, perusahaan harus memiliki campuran direktur yang tepat, terutama direktur yang dapat membawa keragaman pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian, dan ikatan serta orientasi pemangku kepentingan yang lebih luas yang dapat membantu mengembangkan strategi CSR yang efektif yang mengarah pada kinerja CSR yang unggul. Konsisten dengan argumen tersebut, penelitian cenderung menemukan hubungan positif antara proporsi direktur termasuk direktur wanita dan berbagai ukuran kinerja CSR (Qiu & Trojanowski, 2016).

2. Stakeholder Theory

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat di pengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut (Ghozali dan Chairi, 2007). Untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya, perusahaan harus dapat merangkul kepentingan para stakeholder. Perusahaan penting mengetahui berbagai kepentingan stakeholder untuk kemudian menyediakan berbagai macam informasi yang

relevan dan valid terkait dengan aktivitas perusahaan (Anggraeni, 2020). Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lainnya sebagai dampak dari aktifitas-aktifitasnya (Ayu et al., 2013). Teori stakeholder berpendapat bahwa stakeholder (kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) juga harus menerima manfaat dari perusahaan (Anggraini, 2011).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari stakeholder itu sendiri (Daud dan Abrar, 2008). Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Dalam hal ini, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud dialog antara manajemen dengan stakeholder (Indrawati, 2009). Praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat sehingga kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi (Sembiring, 2003).

Oleh karena itu, CSR hadir untuk menyelaraskan kepentingan stakeholder dengan kepentingan perusahaan (Tasya dan Cheisviyanny, 2019). Salah satu faktor yang mendukung teori ini yaitu dewan komisaris

independen. Dewan komisaris merupakan wakil stakeholder didalam suatu entitas yang berbadan hukum perseroan terbatas. Selain sebagai wakil stakeholder, dewan komisaris juga selaku stakeholder, memiliki kemampuan untuk pengaruhi dan menekan menejemen entitas untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas. Teori stakeholder juga menunjukkan bahwa direksi menjadi mekanisme kontrol utama dalam perusahaan dan bertanggung jawab kepada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas (Rao dan Tilt, 2016).

3. Agency Theory

Teori keagenan membahas mengenai pentingnya pembagian antara manajemen dari pemilik perusahaan (Thasya et al, 2020). Jensen, M. C and Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungannya terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. *Agency theory* sejalan dengan adanya pemisahan peran fungsi dewan direksi dan dewan komisaris yang menjelaskan bahwa ketika terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol, manajer tidak memiliki kepentingan yang signifikan dalam perusahaan sehingga manajer akan memilih mementingkan diri sendiri dan melakukan hal yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi para pelaku (Deegan, 2006).

Struktur kepemilikan pada perusahaan diperoleh dari perbandingan jumlah kepemilikan saham seperti saham publik dan institusional yang ada dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh pemerintah, seseorang yang secara individu, masyarakat luas, pihak investor asing, maupun orang lain yang berada dalam perusahaan tersebut (manajerial). Perbedaan persentase kepemilikan saham yang dimiliki investor dapat mempengaruhi tingkat kesempurnaan pengungkapan dalam suatu perusahaan. Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Keterlibatan kepemilikan manajerial didalam perusahaan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam mengawasi perusahaan agar dapat menjalankan program CSR (Rivandi, 2020).

4. Corporate Social Responsibility

Hendriksen (1991) mendefinisikan pengungkapan adalah penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib, yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan adalah alat yang penting untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial suatu perusahaan (Karima et al.,

2005). *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan (Ayu et al., 2013). Konsep awal terlahirnya istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan kewajiban asasi atau tanggung jawab social dari perusahaan yang tidak dapat dihindari dan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objektif dan nilai-nilai value dari suatu masyarakat (Asiah & Muniruddin, 2018).

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerjasama dengan komunitas sosial setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* adalah pengeluaran informasi mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam media laporan tahunan (Nilasari, 2015). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis yang merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan yang secara sukarela memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan dan sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Santioso & Chandra, 2019). Aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan bermanfaat dalam

meningkatkan penjualan, meningkatkan citra perusahaan, menunjukan *brand positioning*, serta meningkatkan daya tarik perusahaan baik di mata investor maupun analis keuangan (Ayu et al., 2013). Salah satu badan yang aktif mengeluarkan pedoman bagi perusahaan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*. Dalam Standar GRI Indikator kinerja di bagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat (Kristi, 2012).

5. Gender Direksi

Keberagaman Gender merupakan keragaman yang berfokus pada keberadaan anggota dewan komisaris dan direksi wanita suatu perusahaan (Septianingsih & Muslih, 2019). Perusahaan dipandang memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran direksi dan dewan komisaris, memiliki pemahaman luas tentang pasar dan konsumen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan (Rahiyandati, 2019). Gender menurut *Webster's New World Directory* pada Umar (1999) adalah perbedaan yang terlihat secara jelas antara pria dan perempuan dilihat dari aspek nilai dan tingkah laku. Sifat dan perilaku yang berbeda laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara sosial dan budaya (Wardani, 2009). Menurutnya gender bukan kodrat melainkan peran perempuan dan laki-laki secara tidak tetap, bisa berubah dan bisa

dipertukarkan, sifatnya bukan biologis, melainkan berupa sosial budaya yang terus menerus berkembang dan diperbaiki.

Perusahaan dipandang memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran direksi dan dewan komisaris, memiliki pemahaman luas tentang pasar dan konsumen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan (Brammer et al., 2007). Kinerja yang baik akan memacu perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR dan pengungkapan yang lebih luas. Menurut Kusumastuti (2008) mengungkapkan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam jajaran dewan perusahaan dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah. Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama. masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama.

6. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Anggraeni, 2020). Dewan komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham berperan sebagai pengawas kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam teori stakeholder. Fungsi pengawasan lebih maksimal jika jumlah dewan komisaris memadai sehingga meningkatkan tata kelola CSR dan kinerja sosial perusahaan (Indriyani dan Sudaryati, 2020).

Dewan komisaris independen dicirikan sebagai dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali yang berbeda dan menghindari hubungan bisnis atau hubungan lainnya. Dewan Komisaris Independen merupakan inti dari GCG yang bertugas menjamin strategi perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap manajer dan menuntut akuntabilitas dalam perusahaan (Pratama et al., 2020)

Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Keberadaan dewan komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, oleh karena itu mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat mendorong pengungkapan

informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Santioso & Chandra, 2019). Direktur yang independen kemungkinan besar lebih menginspirasi manajer menuju ke arah transparansi dan kualitas dari tingkat pengungkapan (Savitri et al., 2021).

7. Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham oleh publik maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Nurdiana & Basar, 2020). Kepemilikan publik yang dimaksud adalah proporsi saham yang dimiliki masyarakat luas dengan pihak manajemen. Kepemilikan saham oleh publik menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Variabel ini ditunjukkan dengan presentase saham yang dimiliki oleh publik dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan total saham perusahaan yang beredar. Perusahaan yang *go public* dituntut untuk lebih transparan mengungkap informasi yang memadai dan relevan dengan tujuan menciptakan pasar modal yang efisien. Dengan proporsi saham yang dimiliki publik lebih besar, akan berakibat pengawasan dari publik lebih besar (Rindawati & Asyik, 2013).

Besarnya kepemilikan saham individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak memiliki kendali atas perusahaan. Oleh sebab itu, investor publik memerlukan perlindungan atas saham yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa pengungkapan informasi keuangan dan non-

keuangan pada perusahaan tahunan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Rivandi, 2020). Salah satu cara agar publik ingin melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan *corporate social responsibility* (Sumilat & Destriana, 2021).

8. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham entitas oleh institusi-institusi keuangan antara lain perusahaan asuransi, asset management, bank, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pihak yang aktif mengawasi pengambilan keputusan (Soemari et al., 2020). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki *opportunity*, *resources*, dan *expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan (Karima et al., 2005).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Nilasari, 2015). Struktur kepemilikan institusional yang besar akan sangat berpengaruh pada keputusan manajemen yang akan diambil. Salah satu keputusannya adalah pengungkapan informasi tanggung jawab (Wartyna & Apriwenni, 2018).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh *gender* direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis dan identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|--|---|---|
| 1. | Nurdiana dan Basar, <i>Jurnal Economix Volume 8 Nomor 1 Juni 2020</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Publik | Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . |
| 2 | Jean Stevany Matitaputty dan Arthik Davianti, <i>JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen</i> , 17(1) 2020, 35-50 http://dx.doi.org/10.31106/jema.v17i1.3612 , ISSN (Online) 2597-4017 | Variabel Y: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X: Gender Direksi | Gender Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 3 | Muhammad Rivandi, <i>Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 13</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate</i> | Kepemilikan Publik tidak |

| | | |
|--|--|--|
| (2), 2020 Diterima: 14 September 2020; P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 205 – 220 | <i>Social Responsibility</i> Variabel X : 1. Kepemilikan Publik 2. Kepemilikan Institusional | berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . |
|--|--|--|

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|--|--|---|
| 4 | Anggraeni. <i>Jurnal Akuntansi</i> . Vol. 30 No. 7, 2020 | Variabel X : Komisaris Independen Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> | Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 5 | Indriyani dan Sudaryati. <i>Jurnal Akuntansi</i> . Vol. 30 No. 8, 2020 | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Gender direksi | Gender direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . |
| 6 | Nadia Dwi Tasya dan Charoline Cheisviyanny, <i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri B, Agustus 2019, Hal 1033-1050</i> ISSN : 2656-3649 (Online) http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/9 | Variabel Y : Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Variabel X : Gender Direksi | Gender Direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 7 | Naila Karima, <i>Naila Karima Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2019</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Institusional | Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada perusahaan |

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|---|---|--|
| 8 | Lusia Revika Septianingsih dkk, <i>Volume 11, Nomor 2, November 2019, pp 218-229 Copyright © 2017 Jurnal Akuntansi Maranatha,</i> | Variabel Y: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : | Gender Direksi memiliki arah negatif dan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | <i>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. ISSN 2085-8698 / e-ISSN 2598-4977. http://journal.maranatha.edu</i> | Gender Direksi | tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 9 | Rizka Hadya dan Romi Susanto, <i>Jurnal Benefita</i> 3(2) Juli 2018 (149-160) | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Gender Direksi | Gender direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social responsibility</i> |
| 10 | Doddy Setiawan dkk, <i>MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VIII, No. 1, Feb 2018</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Gender Direksi | Gender Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . |
| 11 | Nur Asiah dan Said Munirudin, <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)</i> Vol. 3, No. 2, (2018) Halaman 265-275 ol.x, No.x, July xxxx, pp. 1 265 E-ISSN 2581-1002 | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Proporsi Dewan Komisaris Independen | Dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . |

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|---|---|---|
| 12 | Agus Santoso dkk, <i>Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi, Vol. 5 No. 1 Hlmn. 836-853 Madiun, Oktober 2017 e-ISSN: 2337-9723</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Publik | Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 13 | Sumilat dan Destriyana, <i>JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 19, No. 1a, November 2017, Issue 2,</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> | Kepemilikan publik tidak berpengaruh |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <i>Hlm. 129-140</i> | Variabel X : Kepemilikan Publik | terhadap Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 14 | Ibrahim dan Hanefah. <i>Journal Of Financial Reporting and Accounting</i> . Vol. 14 No. 2, 2017 | Variabel X : Komisaris Independen Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> | Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 15 | Muhamad Restu dkk, e-Proceeding of Management : Vol.4, No.3 Desember 2017 Page 2743 | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Proporsi Dewan Komisaris Independen | Dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|---|--|--|
| 16 | Komang Noviani dkk, <i>e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganeshac</i> Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017) | Variabel Y: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X: Kepemilikan Institusional | Kepemilikan Institusional tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> perusahaan. |
| 17 | Yusireta Pajaria dkk, <i>Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi</i> Vol. 10 No. 2 Juli 2016 | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Gender Direksi | Gender Direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 18 | Mirza Nurdin Nugroho dan Agung Yulianto, AAJ 4 (1) (2015) Accounting Analysis Journal http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Proporsi Dewan Komisaris Independen | Dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social</i> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <i>responsibility</i> |
| 19 | Heti Herawati, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal203 - 217 ISSN 2339 - 1545 | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional | Dewan komisaris independen dan Kepemilikan Institusional terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|---|--|--|
| 20 | Ni Made Rahindayati dkk, ISSN : 2337-3067 <i>cE-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.05 (2015) : 312-330</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Gender Direksi | Gender Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . |
| 21 | Widya Puspita Sari dan Puspita Rani, <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur Vol. 4 No. 1 April 2015 ISSN: 2252 7141</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Institusional | Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 22 | Puji Rahayu, dan Indah Anisyukurlillah, <i>AAJ 4 (3) (2015) Accounting Analysis Journal</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Publik | Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 23 | Decky Dermawan dan Tita Deitina, <i>Jurnal Bisnis dan Akuntansi, ISSN: 1410-9875 Vol. 16 No.2 Desember 2014, Hal 158-165</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Publik | Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap <i>corporate social responsibility</i> |

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|----|--|---|---|
| 24 | Gusti Ayu Putu Wiwik Sriayu, ISSN: 2302-8556 <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013): 326-344</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Publik | Kepemilikan Publik berpengaruh positif dan signifikan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | terhadap <i>corporate social responsibility</i> . |
| 25 | Ulfa Luthfia Nanda dan Gista Rismayani, <i>JRKA Volume 5 Isue 1, Februari 2019: 66 - 74</i> | Variabel Y: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X: Gender Direksi | Gender Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 26 | Erva Wartyna, dan Prima Apriwenni, <i>Akuntansi Keuangan ISSN : 2089-7219</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : 1. Kepemilikan Publik 2. Kepemilikan Institusional | Kepemilikan Publik terbukti tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . Kepemilikan Institusional terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |

Lanjutan Tabel 2.1

| No | Penulis dan Identitas Jurnal | Variabel yang digunakan | Hasil |
|-----|---|--|---|
| 27. | Ervika Nila Sari, <i>Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Size Terhadap CSR Disclosure Perusahaan Tambang (Mining Sector) yang Melakukan Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : Kepemilikan Institusional | Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . |
| 28 | Agatha Aprinda Kristi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Publik Di Indonesia | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : 1. Kepemilikan Publik | Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | 2. Kepemilikan Institusional | signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 29 | Nike Nuraini (2011), | Variabel Y : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel X : 1. Proporsi Dewan Komisaris Independen 2. Kepemilikan Institusional | Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |
| 30 | Linda Santioso dan Erline Chandra, <i>JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 14, No. 1, April 2012, Hlm. 17 - 30</i> | Variabel Y : Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Variabel X : Proporsi Dewan Komisaris Independen | Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> |

C. Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Gender* Direksi Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Meningkatnya jumlah wanita yang mengejar karir mempengaruhi jumlah wanita perwakilan di tingkat manajemen puncak. Trennya tidak jauh berbeda di negara-negara Asia, di mana sekitar 5% dewan direksi di China dan India adalah perempuan (Pande & Ford, 2012). Sedangkan Darmadi (2011) menambahkan bahwa ada sekitar 11,2% dewan direksi perempuan di perusahaan publik Indonesia. Tren ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran perempuan (keragaman gender) dalam mengambil keputusan strategis. Perempuan dianggap memiliki perasaan kognitif yang

membuat mereka lebih fokus pada keharmonisan, sosial dan lingkungan. Mereka juga dianggap sebagai individu yang tangguh karena tantangan karir sebelumnya yang harus diatasi sebelum memegang kursi dewan. Meningkatnya jumlah perempuan di posisi dewan menghasilkan hasil ekonomi yang lebih tinggi dan kualitas pendapatan (Matitaputty & Davianti, 2020). Perusahaan dipandang memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran direksi dan dewan komisaris, memiliki pemahaman luas tentang pasar dan konsumen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan (Rahiyandati, 2019).

Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih saksama. Isa dan Muhammad (2015) mengatakan bahwa *woman on board* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* pada perusahaan publik di Nigeria. Didalam model analisis terlihat bahwa keberadaan perempuan sebagai direksi memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan jumlah pengungkapan *Corporate social responsibility* pada perusahaan perusahaan public di Nigeria. Handajani (2014) menyatakan bahwa variasi gender berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan *Corporate social responsibility*, didalam hasil penelitian tersebut terlihat baik laki laki atau pun perempuan yang menduduki

posisi sebagai dewan direksi sama sama berorientasi untuk melakukan pengembangan *corporate social responsibility*. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu yang dibedakan atas gendersonya sama telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk benar benar melaksanakan pengungkapan *corporate social responsibility* (Hadya & Susanto, 2018).

H1 : Gender Direksi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Ratnasari dan Prastiwi (2010) berpendapat bahwa keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Keberadaan dewan komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, oleh karena itu mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Hijriah, 2019). Komisaris independen merupakan kekuatan untuk menyeimbangi keputusan yang akan diambil oleh dewan komisaris yang merupakan pengawas dari perusahaan, dimana dewan komisaris dan komisaris independen memiliki peran penting untuk berhasilnya pelaksanaan *Good Corporate Governance*. (Ramdhaningsih dan Utama, 2013). Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dewan ini dianggap sebagai salah satu instrumen dalam memonitor integritas manajemen yang kedepannya dapat mendorong keluasan informasi pada tanggung jawab sosialnya (Herizona & Yuliana, 2021).

Hasil penelitian Ratnasari dan Prastiwi (2010) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial. Sejalan dengan penelitian Fatimah, et al (2016) menyebutkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif pada *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Hal ini sama artinya dengan apa yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal. Menurut Santiosa dan Chandra (2010) penelitian yang dilakukan di Indonesia terdapat pengaruh dan signifikan terhadap CSR.

H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

3. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia (Savitri et al., 2021). Untuk mendorong kemauan publik untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan, perusahaan harus menampilkan keunggulan yang dimiliki terutama aktivitas sosialnya. Pengertian publik yang dimaksud adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal itu dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan yang dapat menarik para investor dan mendapat legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat (Ayu et al., 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhiyatur (2016), Soejoto (2017) dan Rahmayanty (2015) menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan publik lebih tinggi akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat (Rivandi, 2020).

H3 : Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau badan usaha (Wartyna & Apriwenni, 2018). Kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen. Salah satu aktivitas perusahaan yang dimonitor oleh pemilik saham institusi adalah pengungkapan CSR. Dari penjelasan tersebut, memberi pemahaman bahwa dengan kepemilikan institusional yang besar akan membantu dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah keputusan untuk *mengungkapkan corporate social responsibility* (Noviani et al., 2017).

Mengacu pada penelitian Sari dan Sukoharsono (2013) serta Sanjaya dan Azhar (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen agar tidak terjadi kecurangan, atau dengan kata lain kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Bangun dkk, 2012). Investor institusional dapat

melakukan monitoring dan tidak mudah dibohongi oleh tindakan manajer. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi; 2) memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

